



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA LAHAT

Resty Seftiany¹ • Wita Hariani² • Trecy Austin³

Abstract. Poverty remains a significant social problem in Lahat City, as it directly affects the quality of life of the community. The local government has implemented various poverty alleviation policies; however, their implementation has not yet achieved optimal outcomes. This study aims to examine the implementation of poverty alleviation policies in Lahat City by analyzing data collection processes, aid distribution mechanisms, the role of implementing officials, and the impact of policies on the social and economic conditions of poor communities. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving local government officials, program beneficiaries, and community leaders. The findings indicate that poverty alleviation policies in Lahat City have provided tangible benefits, particularly through social assistance programs and the fulfillment of basic needs. Nevertheless, policy effectiveness is constrained by inaccurate beneficiary data, limited budget allocation, and weak coordination among related institutions. Conversely, strong commitment from the local government, active involvement of frontline officials, and support from community leaders serve as important supporting factors. This study concludes that improving data accuracy, strengthening institutional coordination, and developing long-term economic empowerment programs are essential to enhance the effectiveness and sustainability of poverty alleviation policies in Lahat City.

Keywords: Policy Implementation, Poverty, Social Welfare, Public Policy

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di Kota Lahat dan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Data dari Dinas Sosial Kota Lahat menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang memerlukan perhatian serta penanganan melalui kebijakan publik yang tepat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah sebenarnya telah melaksanakan berbagai program

Correspondence Author

Resty Seftiany

Institut Teknologi Pagar Alam

Email : restyseftiany6@gmail.com



penanggulangan kemiskinan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi prosedur administrasi yang relatif kompleks, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara efektif. Selain itu, akses masyarakat terhadap program bantuan juga belum merata, sehingga masih terdapat kelompok miskin yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan yang ada. Keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan dari tokoh dan lembaga setempat. Ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata masyarakat dengan pelaksanaan program di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah (Purnawan et al., 2022). Dalam perspektif teori kemiskinan multidimensional yang dikemukakan oleh Sen dalam (Ramly et al., 2017), kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk menilai kebijakan yang tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Dalam konteks implementasi kebijakan, Lipsky dalam (Selviana, 2020) melalui konsep *street-level bureaucracy* menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Aparatur di tingkat lapangan memiliki diskresi dalam menjalankan kebijakan, sehingga sikap dan kinerja mereka sangat menentukan keberhasilan program (Purnawan, Suri, et al., 2023). Hal ini menjadi aspek penting dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Van Meter dan Van Horn dalam (Purnawan, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, antara lain kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, komunikasi, karakteristik pelaksana, serta lingkungan sosial dan ekonomi. Kerangka tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat.

Salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kebijakan adalah ketidaktepatan pendataan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat (Dani & Purnawan, 2025). Sistem pendataan yang masih bergantung pada data administratif belum sepenuhnya mampu menangkap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis. Perubahan kondisi rumah tangga, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sering kali tidak segera tercatat, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan (Purnawan, Mardianto, et al., 2023). Permasalahan pendataan tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data kemiskinan. Perbedaan sumber data dan mekanisme pemutakhiran informasi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan data penerima bantuan. Selain itu, proses verifikasi di



tingkat desa dan kelurahan belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya aparatur dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Ketidaktepatan pendataan berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah (Rahmansyah et al., 2020). Bantuan yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat keberlanjutan program. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendataan yang berbasis kondisi nyata masyarakat serta penguatan koordinasi kelembagaan menjadi hal yang sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat secara mendalam, mulai dari proses pendataan, penyaluran bantuan, hingga peran aparatur dan masyarakat sebagai penerima manfaat. penelitian ini juga berupaya memahami dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi (Koentjaraningrat, 2003). Wawancara mendalam diarahkan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan tersebut (Sriati, 2013). Informan utama adalah aparatur pemerintah daerah, khususnya OPD yang menangani bidang sosial dan perencanaan. Mereka diwawancarai untuk menggali bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai, serta mekanisme pelaksanaannya di tingkat kota. Dari kelompok ini diperoleh pemahaman mengenai peran pemerintah, koordinasi antarinstansi, dan strategi yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya ditujukan kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program penanggulangan kemiskinan dirasakan manfaatnya, perubahan yang dialami setelah menerima bantuan, serta persepsi masyarakat terhadap ketepatan sasaran kebijakan. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan informan mengenai keberhasilan, hambatan, dan dampak implementasi kebijakan. Observasi lapangan memungkinkan peneliti melihat kondisi nyata masyarakat penerima manfaat dan pelaksanaan program di lapangan (Aslichati et al., 2014). Sementara dokumentasi berupa laporan pemerintah, data statistik kemiskinan, serta dokumen program digunakan untuk memvalidasi dan melengkapi temuan dari wawancara dan observasi.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Pihak-pihak tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penerimaan



manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Dengan melibatkan berbagai subjek, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh (Creswell, 2019) mengenai bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan diterapkan. Subjek penelitian dari unsur pemerintah daerah meliputi aparatur yang bekerja pada instansi terkait, khususnya yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Aparatur pemerintah dipilih karena mereka berperan sebagai pelaksana kebijakan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Melalui pandangan aparatur ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana kebijakan dilaksanakan, kendala yang sering dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Selain aparatur pemerintah subjek penelitian juga melibatkan masyarakat penerima manfaat serta tokoh masyarakat setempat. Masyarakat penerima manfaat dipilih untuk mengetahui pengalaman mereka dalam mengakses program bantuan dan merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tokoh masyarakat dipilih karena memiliki kedekatan dengan warga dan memahami kondisi sosial ekonomi di lingkungannya. Keterlibatan berbagai subjek ini diharapkan dapat memperkaya data penelitian dan memberikan gambaran yang lebih nyata (Creswell, 2013) mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan informan mengenai keberhasilan, hambatan, dan dampak implementasi kebijakan. Observasi lapangan memungkinkan peneliti melihat kondisi nyata masyarakat penerima manfaat dan pelaksanaan program di lapangan. Sementara dokumentasi berupa laporan pemerintah, data statistik kemiskinan, serta dokumen program digunakan untuk memvalidasi dan melengkapi temuan dari wawancara dan observasi (Andi Prastowo, 2012).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu daerah dengan karakteristik ekonomi masyarakat yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal. Penelitian focus pada beberapa kecamatan dan kelurahan yang menjadi sasaran utama program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengamati secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat, proses pendataan dan penyaluran bantuan, serta pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat lapangan. Dengan melakukan penelitian di wilayah-wilayah tersebut peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas dan nyata mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat. Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi para pelaku kebijakan serta masyarakat



penerima manfaat secara lebih komprehensif. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat dan proses pelaksanaan program di lapangan.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat salah satu prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya tersebut meliputi pemberian bantuan sosial, bantuan pangan, serta program-program yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kebijakan ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kesulitan ekonomi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan yang lebih dalam. Selain program bantuan sosial, pemerintah Kota Lahat juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat adalah adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan isu kemiskinan sebagai prioritas pembangunan. Komitmen tersebut tercermin dari penyusunan berbagai kebijakan dan program yang secara khusus ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, baik melalui bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi. Dukungan kebijakan ini memberikan landasan yang kuat bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan aparat pemerintah di tingkat lapangan yang cukup aktif dalam melaksanakan program. Aparatur desa dan kelurahan berperan penting dalam proses pendataan, penyaluran bantuan, serta pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat. Selain itu, adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat turut membantu kelancaran pelaksanaan program, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mendorong partisipasi warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

Faktor Penghambat

Salah satu hambatan utama adalah ketidaktepatan data masyarakat miskin yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Data yang belum diperbarui secara berkala menyebabkan adanya masyarakat yang layak menerima bantuan justru terlewatkan, sementara sebagian penerima bantuan dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Permasalahan data ini menjadi kendala serius dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran. Selain permasalahan data, keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua program dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin, terutama di wilayah pinggiran. Sementara itu, koordinasi yang belum optimal antarinstansi terkait sering kali menimbulkan tumpang tindih



program atau keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ke depan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lahat telah melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Program bantuan sosial dan bantuan pangan dinilai cukup membantu masyarakat miskin dalam menjaga keberlangsungan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata, khususnya dalam jangka pendek. pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas program. Permasalahan utama terletak pada akurasi pendataan masyarakat miskin yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data yang tidak diperbarui secara konsisten menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kelompok masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Selain itu, keterbatasan anggaran serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal turut membatasi jangkauan dan keberlanjutan program. adanya komitmen pemerintah daerah, peran aktif aparatur di tingkat desa dan kelurahan, serta dukungan tokoh masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pendataan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi jangka panjang perlu menjadi perhatian utama agar kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Lahat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-ruzz Media.
- Aslichati, L., Prasetyo, H. I. B., & Irawan, P. (2014). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dani, R., & Purnawan, H. (2025). Bridging Aspirations and Policy : An Analysis of Community Input Absorption from Recess Activities of the Regional People ' s Representative Council in Bengkulu Province. *Jurnal Public Policy*, 3(11), 335–346.
- Koentjaraningrat. (2003). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.
- Purnawan, H., Suri, E. W., Saputra, N., & Aprianty, H. (2023). The Implementation of Micro Credit Program (KUR) on the Welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM): A Case Study at BRI Bank Office, East Lingkar Unit, Bengkulu City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 8(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/23804>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(4), 159–166.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017*, 1(Oktober), 379–392.
- Selviana, M. (2020). *Implementasi Pelayanan Publik SP4N-LAPOR di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bantaeng*. 1–126.
- Sriati. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. In *Unsri Press* (1st ed., Issue 1).



Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

